

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT  
BAGI ETNIS TIONGHOA DI KABUPATEN KARIMUN**

*Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan*



**Disusun Oleh :**

**R. BALKHIS TIARANI PUTRI**

**NIM 1520122025**

**Dosen Pembimbing :**

**Prof. Dr. SALDI ISRA, S.H., MPA.**

**Dr. BEATRIX BENNI, S.H., MPd., MKn.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

# **AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TIDAK TERCATAT BAGI ETNIS TIONGHOA DI KABUPATEN KARIMUN**

## **ABSTRAK**

**(R. Balkhis Tiarani Putri, 1520122025, Magister Kenotariatan Fakultas  
Hukum Universitas Andalas, 114 halaman, Padang, 2017)**

Pencatatan perkawinan yang harus dilakukan oleh Etnis Tionghoa merupakan unsur penting untuk menunjukkan suatu kesahan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya di Kabupaten Karimun masih banyak masyarakat Etnis Tionghoa yang tidak mencatatkan perkawinan mereka pada kantor pencatatan sipil, hal ini menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban hubungan keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut. Tesis ini akan merumuskan permasalahan, Pertama, prosedur pencatatan perkawinan pada etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun., kedua, akibat hukum bagi etnis Tionghoa di Kabupaten Karimun yang tidak mencatatkan perkawinan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang diawali dengan pengumpulan dan penyusunan data yang dilanjutkan dengan pengkajian data untuk memperoleh gambaran mengenai akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, selanjutnya penulis melakukan pendekatan secara non-doktrinal dengan meneliti maupun mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan tata urutan perundang-undangan agar tidak bertentangan dan dianalisis tanpa menggunakan rumus dan angka. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pertama, prosedur pencatatan perkawinan pada etnis Tionghoa yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang tata cara perkawinan dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Kedua, akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, isteri tidak dapat menuntut hak keperdataan secara hukum, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap anak luar kawin atau anak tidak sah oleh negara dan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya serta tidak adanya harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan.

**Kata Kunci: Etnis Tionghoa, Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat**

## LEGAL CONSEQUENCES OF UNREGISTERED MARRIAGE FOR *TIONGHOA* PEOPLE IN KARIMUN DISTRICT

### ABSTRACT

(R. Balkhis Tiarani Putri, 1520122025, Master of Notary, Law Faculty,  
Andalas University, 102 pages, Padang, 2017)

The registration of marriage that should be done by the *Tionghoa* people is an important element to indicate a validity of a marriage according to existed regulation. In fact, in Karimun District there are still many *Tionghoa* people who do not register their marriage at the civil registration office, this has a legal effect on the rights and obligations of civil relations that appear from the marriage. This thesis will formulate the problems, First, the procedure of marriage registration of *Tionghoa* people in Karimun district, secondly, the legal consequences for *Tionghoa* people in Karimun district who do not register their marriage. The analytical method that used in this research is analytical descriptive method that begins with the collection and compilation of data which followed with the assessment of data to obtain a description of the legal effect on unregistered marriage, then the author did a non-doctrinal approach by researching and reviewing secondary data which consist of primary legal materials, secondary legal materials as well as tertiary legal materials. The data analysis which used is qualitative juridical, which is with observing to the hierarchy of legislation in order not to contradict of each other and analyzed without using formulas and numbers. Based on the results of this study, it can be seen that First, the procedure of marriage registration of *Tionghoa* people that have been set firmly and clearly in the Law No 1 Year 1974 about Marriage, Government Regulation No 9 Year 1975 about Implementation of Law No 1 Year 1974 about Marriage, which regulate the procedures of marriage, then the Law No 23 Year 2006 about Population Administration and also Law No 24 Year 2013 about Amendment of Law No 23 Year 2006 about Population Administration which regulate about the registration of marriage. Second, the legal consequences of unregistered marriage is the marriage considered illegal by the law, the wife could not demand her civil rights in legal way, the child who born by unregistered marriage also considered by illegitimate children by the law and do not have civil relationships with his biologic father and also the absence joint property in the marriage.

**Kata Kunci:** *Tionghoa* people, Marriage Registration, Legal Consequences of Unregistered Marriage